

- ✦ **PENINGKATAN KETERAMPILAN MENULIS CERPEN MENGGUNAKAN TEKNIK MODELING DENGAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII.A SMPN 1 SABBANGPARU**

Oleh Herniyastuti

- ✦ **PENGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (*PROBLEM BASED LEARNING*) TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA KELAS VII-2 SMP NEGERI 14 AMBON**

Oleh Mohammad Amin Lasaiba

- ✦ **PENINGKATAN HASIL BELAJAR BIOLOGI MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ATI (*ATTITUDE TREATMENT INTERACTION*) SISWA KELAS VII SMP NEGERI 3 SENGKANG KABUPATEN WAJO**

Oleh Muhammad Arafah

- ✦ **UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENIS MEJA MELALUI PENDEKATAN METODE BAGIAN PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 19 AMBON**

Oleh Jonas Solissa

- ✦ **PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU (Studi Pada SD Negeri 77 Ambon)**

Oleh Geradin Rehatta

- ✦ **PENERAPAN NILAI-NILAI LOKAL PADA KEPEMIMPINAN KEPALA SMA NEGERI SE-KABUPATEN WAJO**

Oleh Sumarni

- ✦ **ANALISIS PENERAPAN TIPE PEMBELAJARAN *TALKING STICK* DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS X₂ SMA NEGERI 1 LEIHITU PADA MATA PELAJARAN EKONOMI**

Oleh Stevie Sahusilawane

- ✦ **HUMANISME HUMANISTIK DAN HUMANISASI PENDIDIKAN INDONESIA**

Oleh Iwan Rumalean



literasi



29/06/2010

PENERAPAN NILAI-NILAI LOKAL KEPEMIMPINAN KEPALA SMA NEGERI SE-KABUPATEN WAJO

Oleh Sumarni

*Dosen Program Studi Administrasi Pendidikan
STKIP Puangrimaggalatung Sengkang*

Abstrak: Penerapan kepemimpinan lokal Bugis oleh kepala sekolah se-Kabupaten Wajo melalui perilaku kepemimpinan di sekolah. Kepemimpinan lokal Bugis yang diaplikasikan tersebut yaitu (1) *Siri'* adalah sistem diterapkan dan diberikan kepada guru-guru, pengawai, siswa, komite sekolah, orang tua dan masyarakat yang dilakukan oleh kepala sekolah tidak hanya sebatas pemberian DP3 tetapi dalam banyak hal menyangkut aspek-aspek yang ada di sekolah, (2) *Reso'* adalah usaha yang dilakukan dengan pemberdayaan seluruh warga sekolah sudah secara maksimal dilaksanakan oleh kepala sekolah. Pemberdayaan dilakukan melibatkan semua personil dalam perencanaan, aktif dalam pelaksanaan dan keterbukaan dalam evaluasi, (3) nilai *Lempu'* merupakan landasan hubungan sesama manusia dan merupakan salah satu faktor dasar dalam kehidupan, dan (4) *Getteng* diupaya secara maksimal untuk melibatkan, guru, siswa, orang tua dan masyarakat.

Kata-kata kunci: Nilai-nilai lokal, Kepemimpinan, Kepala sekolah.

PENDAHULUAN

Masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya warga Bugis-Makassar, sejak dahulu telah memiliki sistem kepemimpinan lokal yang dikenal dengan budaya *Siri'*. Sistem nilai budaya *Siri'* merupakan nilai utama. Nilai *Siri'* dimaknai sebagai suatu yang sangat berharga dan dijunjung tinggi oleh orang Bugis-Makassar. Nilai *Siri'* memberi warna bagi kehidupan masyarakatnya dan ditambah dengan nilai-nilai keberibadian yang lainnya. Nilai *Siri'* sebagai nilai utama harus dipandang sebagai nilai-nilai yang utuh dan mempunyai dua sisi, ibarat mata uang, harganya terletak pada dua sisinya. Satu dari padanya hilang tidak berhargalah (Samad A, 2007).

Kabupaten Wajo merupakan satu kabupaten di antara gugusan Wilayah kabupaten di Sulawesi Selatan seperti Bone, Barru, Pinrang, Soppeng yang penduduk aslinya lahir dan besar sebagai etnik Bugis-Makassar yang menjunjung nilai-nilai lokal tersebut. Berdasarkan hal ini, kepala SMA baik sebagai individu ataupun sebagai warga masyarakat yang orang tuanya berasal dari etnik Bugis-Makassar, dapat diinterpretasi bahwa pada dirinya terinternalisasi nilai-nilai lokal dan nilai-nilai lokal tersebut sedikit banyaknya memengaruhi dirinya dalam bersikap

dan bertingkah laku baik sebagai individu maupun sebagai kepala sekolah.

Nilai lokal dalam perilaku kepemimpinan kepala sekolah banyak dipraktikkan oleh kepala sekolah yang ada di Kabupaten Wajo. Hal ini ditunjukkan dalam tindakan keseharian kepala sekolah yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan ataupun manajer di sekolah. Salah satu contoh dari tindakan yang dimaksud adalah penerapan nilai *patiroang*, *paraga-raga*, dan nilai *paampiri*.

Ketiga nilai ini dalam bahasa Jawa sama maknanya dengan nilai *ingarso sungtulodo*, *imadyo mangun karso*, *tutwuri handayani*. Artinya bahwa *rioloi napatiroang*, *ritengngai naparaga-raga*, *rimunri napa ampiri*. Maknanya bahwa seorang pemimpin atau kepala sekolah jika berada di depan maka dia menjadi panutan bagi bawahannya, jika berada di tengah maka dia berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan jika berada di belakang maka dia menjadi motivator bagi bawahannya.

Berdasarkan keterangan di atas, ditemukan fakta empiris bahwa rata-rata kepala sekolah khususnya kepala sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Wajo dalam kesehariannya sebagai pimpinan ataupun manajer di sekolah menunjukkan tindakan *patiroang*, *paraga-raga*, dan *paampiri*. Karakter yang ditunjukkan dari beberapa Kepala SMA Negeri Se Kabupaten Wajo juga merupakan karakter yang kental sebagai orang Bugis. Ia lahir dan besar dalam lingkungan keluarga Bugis. Sejak kecil dididik dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh adat Bugis, sehingga pada dirinya terinternalisasi sifat dan nilai moril orang Bugis. Pada dirinya tercermin nilai *lempu'* (jujur), *acca* (cendikia), *sitinaja* (patut), *getteng* (teguh),

reso (teknun atau usaha). Keyakinan empirik ini dikuatkan oleh keterangan beberapa informan yang berinteraksi setiap hari bekerja bersamanya.

Berdasarkan fenomena empirik di atas, bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh kepala SMA Negeri Se Kabupaten Wajo tersebut merupakan aplikasi nilai-nilai lokal. Penulis kemudian tertantang untuk menelusuri lebih jauh penerapan nilai-nilai lokal yaitu dalam kepemimpinan Kepala di SMA Negeri Se Kabupaten Wajo. Alasan-alasan apa yang mendasari sehingga mengaplikasikan nilai lokal bagaimana proses pengaplikasiannya, serta bagaimana dampak penerapannya dalam perilaku kepemimpinan di sekolah. Dan peneliti mengambil unsur-unsur nilai-nilai lokal yang terdiri dari *lempu'* (jujur), *acca* (cendikia), *sitinaja* (patut), *getteng* (teguh), *reso* (usaha atau kerja keras) sebagai variabel pada penelitian ini. Penelitian bermanfaat untuk mengetahui nilai-nilai lokal yang ditrapkan dalam kepemimpinan Kepala SMA Negeri Se Kabupaten Wajo, proses penerapan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinan dan dampak penerapan nilai-nilai lokal dalam kepemimpinan Kepala SMA Negeri Se Kabupaten Wajo.

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan. Banyak ahli yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memengaruhi suatu kelompok yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Hughes (2006) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan tiga hal utama, yakni pemimpin, pengikut, dan situasi.

Kepemimpinan lokal yang dipengaruhi oleh nilai lokal ini diyakini memiliki pengaruh terhadap

produktivitas dan kohesivitas kelompok. Selain definisi di atas, ada beberapa pendapat yang menyatakan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Bennis (1989) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses dimana seorang agen mempengaruhi bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkannya.

PEMBAHASAN

Ketercapaian tujuan pendidikan diakui memang sangat bergantung pada kecakapan, kebijaksanaan, kepemimpinan, kepala sekolah sebagai pemimpin unit pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur ataupun menata kelola semua sumber daya organisasi yang ada di sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Keprofesionalan dan tugas kepala sekolah utamanya dalam upaya peningkatan mutu dan ketercapaian tujuan pendidikan, banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga dapat terwujud, demikian pula sebaliknya.

Levy & Ritti (2003) menyebutkan, bahwa dewasa ini tidak jarang ditemui fenomena akibat dari kurang profesionalnya kepala sekolah sehingga banyak kasus-kasus perilaku kontra produktif yang terjadi, *antithesis* dari perilaku produktif. Perilaku kontra produktif adalah perilaku penyimpangan sosial seperti perilaku mencuri/ maling (*theft*), perilaku sabotase (*sabotage*), pemerasan (*blackmail*), penyuapan (*bribery*) dan Perilaku menyerang orang lain (*aggression*).

Kasus tersebut merupakan bentuk-bentuk perilaku kontra produktif, dan pada hakekatnya merupakan akibat dari rendahnya mental atau nilai moral kepala sekolah. Secara psikologis, fenomena “menyimpang” seperti terdapat

di lingkungan sekolah, juga menjadi konteks perilaku kelompok (*group behaviour*). Pada situasi terdapatnya kesempatan (*opportunity*) akibat lemahnya kendali kelompok (*group control*), akibat ketidak paduan antara kata dan perbuatan (*inconsistency*), demikian pula akibat persaingan ketat dalam mengajarkan tujuan materi (*material-led competition*), diduga kuat gampang memunculkan perilaku yang tidak mengindahkan norma dan nilai setempat.

Perilaku kontra produktif sebagai suatu gejala sosial, khususnya penyelewengan tanggungjawab atau korupsi mengamati dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kesempatan/ peluang, budaya, status sosial, motif dan gaya hidup, yang pada intinya mengacu pada upaya pemuasan nafsu konsumerisme individu. (Meliala, 1998).

Adapun penyebab terjadinya perilaku kontra produktif yang dilakukan kepala sekolah tidak terlepas dari adanya unsur pribadi dan lingkungan ataupun adanya pergeseran tatanan nilai, antara lain (1) lemahnya pendidikan, pengajaran agama dan etika, (2) ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi perilaku yang menjinakkan kontra produktif tersebut, (3) kemiskinan pelakunya, (4) tidak adanya hukuman yang keras. Senada dengan itu, Samad (2000:2) mengungkapkan, bahwa “terjadinya pergeseran tatanan nilai dalam masyarakat, karena tatanan nilai tidak mampu memberikan pedoman dalam berperilaku, sehingga sulit lagi dikendalikan perilakunya, baik oleh struktur, dirinya sendiri, maupun oleh lembaga pendidikan”.

Begitupun demikian adanya, diyakini bahwa tidak semua pribadi yang memiliki predisposisi melakukan perilaku

kontra produktif ternyata benar-benar melakukannya. Masih terdapat faktor-faktor tertentu atau kombinasinya, yang membuat individu melakukan atau tidak melakukan perilaku kontra produktif tersebut khususnya tindakan penyelewengan atas tanggungjawab yang diembannya.

Seorang kepala sekolah kadang kala menerima tugas-tugas yang berbeda yang mengarah pada terjadinya konflik peran (*role conflict*), di mana pelaksanaan kegiatan atau kerja dengan satu tekanan dapat menyulitkan hal yang lain dengan tekanan yang menyertainya. Konflik peran (*role conflict*) yang terjadi pada pekerjaan dapat mengarah pada tingkahlaku disfungsional dalam pekerjaan seperti ketidakpuasan kerja, kecenderungan untuk meninggalkan organisasi dan komitmen yang rendah.

Menurut Alatas (1975) dalam Meliala (1998), bahwa "faktor-faktor individual pada tingkat tertentu dari pertimbangan moral seseorang, seperti tingginya penghayatan keagamaan dan motif kejujuran mungkin dapat dikatakan sebagai hal yang menghambat seseorang melakukan perilaku menyimpang ataupun tingkahlaku disfungsional". Demikian pula Winardi (2004:10) menyebutkan, bahwa dengan "sistem nilai pribadi yang dimiliki seseorang mempunyai pengaruh kuat atas persepsinya tentang situasi tertentu dan perilakunya".

Kepemimpinan merupakan faktor manusiawi yang paling menentukan sukses tidaknya suatu lembaga atau organisasi, lembaga pendidikan atau lembaga kenegaraan, sebab ia merupakan motor atau tonggak penggerak dan bertanggung jawab atas segala aktivitas dan fasilitas. Dia dituntut untuk mampu mengatasi tindakan-tindakan yang berdasarkan pada perkiraan-perkiraan

yang menampung apa yang terjadi mengenai kelemahan-kelemahan serta bisa mencapai tujuan dan sasaran dalam waktu yang telah ditentukan. Kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi atau lembaga. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang disertai tugas untuk memimpin suatu organisasi.

Sebenarnya menjadi pemimpin itu tidaklah mudah, tidak semudah yang dibayangkan. Menurut Haiman: Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seorang memimpin, membimbing, mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkahlaku orang lain. Munson (1921) berpendapat kepemimpinan adalah sebagai kemampuan menhandel orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan kerjasama yang besar. Kepemimpinan adalah kekuatan semangat atau moral yang kreatif dan terarah. Sedangkan menurut Edwin Locke, Kepemimpinan adalah sebagai proses membujuk orang-orang lain untuk mengambil langkah menuju sasaran bersama. Dari definisi tersebut, bisa dikategorikan tiga elemen berikut.

1. Kepemimpinan merupakan suatu proses (*relational concept*). Kepemimpinan hanya ada dengan relasi orang lain (para pengikut), jika tidak ada pengikut, maka kepemimpinan tidak akan ada. Tersirat dengan definisi ini adalah premis para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana

- membangkitkan inspirasi dan relasi dengan para pengikut mereka.
2. Kepemimpinan merupakan suatu proses, agar bisa memimpin dan pemimpin harus bisa melakukan sesuatu, kepemimpinan merupakan lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tetapi sekedar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat seseorang menjadi pemimpin.
 3. Kepemimpinan harus membujuk orang lain untuk mengambil tindakan. Pemimpin membujuk para pengikutnya melalui berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi dan mengomunikasikan sebuah visi.

Selain itu terdapat tiga jenis kepemimpinan yang dipandang representative dengan tuntutan era desentralisasi, yaitu kepemimpinan yang transaksional, kepemimpinan yang transformatif, dan kepemimpinan visioner. (Aan Komariah, Cepi Triatna, 2008:74), Ketiga kepemimpinan ini memiliki titik konsentrasi yang khas sesuai dengan jenis permasalahan dan mekanisme kerja yang diserahkan pada bawahan.

- a) Kepemimpinan yang visioner salah satu kepemimpinan yang ditandai oleh kemampuan dalam membuat perencanaan yang jelas sehingga dari rumusan visinya tersebut akan tergambar sasaran apa yang hendak dicapai dari pengembangan lembaga yang dipimpinnya. Dalam konteks kepemimpinan pendidikan, penentuan sasaran dari rumusan visi tersebut dikenal dengan penentuan hasil pokok. Paradigma pendidikan yang

memberikan kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya, selain itu merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh sekolahnya.

Kepemimpinan Bugis

Setiap kelompok masyarakat memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin menjalankan kepemimpinannya berdasarkan amanah yang diberikan kepadanya, dengan suatu sistem yang disebut sistem kepemimpinan. Sistem kepemimpinan yang mengatur tata kehidupan masyarakat memberi pengaruh yang kuat dalam hal pembentukan pribadi dan perilaku anggota masyarakatnya. Sebaliknya, watak dan pola tingkah laku anggotanya mewarnai kehidupan masyarakat secara umum yang selanjutnya membentuk kepribadian umum.

Ada pemimpin negara yang dianggap oleh masyarakat sebagai "dewa", dan diterima kekuasaannya sebagai suatu karunia yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Ucapannya dianggap sebagai titah dewa yang tak terbantahkan. Siapa saja yang berani membantahnya akan kualat dan harus bersedia menjalani sanksi yang ditetapkan olehnya seperti undang-undang khusus yang dibuat untuk menjerat oknum yang mencoba memberikan kritik atas kebijakannya. Posisi rakyat adalah sebagai objek dan harus bersedia menerima kehendak pemimpinnya serta melaksanakan

dengan penuh keikhlasan tanpa terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Ada pula pemimpin yang diangkat oleh masyarakat karena dianggap sebagai orang yang terbaik di kalangan mereka, karena rakyat yakin bahwa sang pemimpin mampu melaksanakan amanah yang dipercayakan rakyat kepadanya. Masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban pemimpinnya. Pemimpin tidak boleh menetapkan kebijakan secara sepihak atau tanpa persetujuan rakyat dan hasil kesepakatan itu harus dijunjung tinggi, baik oleh pemimpin maupun rakyat. Setiap pelanggar, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa, harus bersedia menjalani hukuman sesuai dengan peraturan yang disepakati secara bersama-sama. Artinya, hukum adalah galanya. Tidak ada seorang pun yang menduduki kedudukan istimewa di mata hukum dalam negara itu. Berikut beberapa model kepemimpinan bugis yang pernah dianut oleh masyarakat bugis klasik.

Kepemimpinan Periode *Galigo*

Sebelum kepemimpinan *Lontara'*, terdapat model kepemimpinan masyarakat bugis yang dikenal dengan kepemimpinan periode *Galigo*. Pada periode itu, raja dianggap sebagai wakil dewa di langit. Mereka dipuja dan amat ditaati oleh rakyatnya. Rakyat percaya bahwa raja mempunyai kelebihan dan kesaktian yang tidak dimiliki oleh rakyat biasa. Rakyat menempati kedudukan sebagai objek dan keistimewaan hanya dimiliki oleh raja. Rakyat sama sekali tidak mempunyai kekuatan kecuali mengabdikan diri sepenuhnya pada raja. Sebagai lambang kesaktian para raja, kepemimpinan itu dipelihara secara turun-temurun dan merupakan warisan dewa dari langit yang telah

dipersembahkan kepada raja. Selain keturunan dewa, tidak ada hak dan kesempatan bagi orang untuk menduduki posisi itu (Mattulada, 1975: 357-388).

Raja dianggap oleh masyarakat memiliki kesaktian, karamah, dan amat disegani serta ditakuti rakyat. Raja mempunyai pengaruh yang besar sehingga rakyat harus tunduk dan patuh kepada perintah raja. Siapa saja yang berani menantang atau tidak menaati perintah raja, harus bersedia menanggung risiko sesuai dengan keinginan raja.

Kepemimpinan Era *Lontara'*

Menurut Mattulada (1975:357-388), kecenderungan untuk menjadikan pola kepemimpinan *Galigo* masih sering menampakkan pengaruhnya pada generasi sesudahnya. Namun, pola itu lambat laun ditinggalkan dengan tampilnya peran orang biasa dalam tampuk kekuasaan sebagai pemimpin rakyat yang dikenal sebagai pemimpin *anang 1*.

Kelompok *anang* masing-masing mempunyai pemimpin tetap, yang diteruskan secara *patrilineal* dari keluarga tertua dalam *anang (a)*.

Pimpinan *anang* adalah suatu keadaan peralihan, kemudian melahirkan *Tomanurung* (sebutan bagi manusia istimewa yang berasal dari dunia atas dan turun ke bumi manusia Bugis untuk menyelamatkan negara yang mengalami masa *chaos*) dalam priode *Lontara' (b)*.

Tomanurung berasal dari dua kata yaitu 'to' artinya 'orang', 'Manusia' dan 'manurung' artinya 'turun' atau 'menjelma jadi', 'tomanurung' adalah manusia yang menjelma di kalangan masyarakat yang dimuliakan karena keluhuran budi pekertinya, sehingga diangkat menjadi pemimpin.

Menurut Abdullah (1985:69), kehadiran *Tomanurung 2* dalam kehidupan masyarakat Bugis merupakan awal terbentuknya organisasi sosial atau kemasyarakatan, institusi sosial, dan awal sistem politik atau sistem kekuasaan yang menempatkan manusia (masyarakat) pada posisi yang mulia. *Tomanurung* inilah yang merupakan cikal bakal pemerintahan periode *Lontara'*.

Periode *Lontara'*, babakan baru telah terbuka dalam kehidupan politik masyarakat Bugis, terutama dalam memandang pemimpinnya dalam mengendalikan negeri. Pada periode ini, terdapat kecenderungan bahwa orang Bugis amat menjunjung tinggi kedudukan manusia sebagai 'tau'. Oleh karena itu, tampak dalam *Lontara' Latoa* dan *Lontara'* lainnya bahwa pembinaan watak manusia dalam membangun *Panggadëřeng* (tata aturan dan hukum) mendapat tempat yang amat penting.

Manusia menjadi pusat penentu atas kehidupan kebudayaan. Manusia menempati tempat tertinggi dalam menentukan nasib sendiri. Untuk memahami konsep kepemimpinan *Lontara'*, perlu diperhatikan hal yang menyangkut syarat pemimpin, kewajiban pemimpin, kedudukan rakyat dalam negara, struktur politik kepemimpinan *Lontara'*, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Adapun syarat pemimpin bagi masyarakat Bugis yaitu pribadi yang adiluhung. Pribadi yang dijiwai oleh prinsip *siri'-pësse* meliputi sifat jujur, takwa, solider, gigih memperjuangkan kesejahteraan dan kedamaian rakyat, berani, teguh dalam pendirian, mampu mempersatukan rakyatnya, berwibawa, adil, terbuka pada nasihat dan kritikan.

Sifat adiluhung pemimpin Bugis tergambar dalam masa pemerintahan *Arung Matoa Wajo La Palewo Tu Palippu* (1474-1482). Syarat seorang yang menjadi raja adalah sebagai berikut. (a) jujur terhadap Dewata Seuwae dan sesama manusia, (b) takut kepada Dewata Seuwae dan menghormati rakyat dan orang asing serta tidak membedakan rakyatnya, (c) mampu memperjuangkan kebaikan negeri agar berkembang, dan mampu menjamin tidak terjadinya perselisihan antara pejabat kerajaan dan rakyat, (d) mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya yaitu (1) berani dan tegas, tidak gentar hatinya mendapat berita buruk (kritikan) dan berita baik (tidak mudah terbuai oleh sanjungan), (2) mampu mempersatukan rakyatnya beserta para pejabat kerajaan, (3) berwibawa terhadap para pejabat dan pembantu-pembantu, (4) Jujur dalam segala keputusannya. (Abidin, 1983:163)

Di kerajaan Pammana, *datu* (raja) harus memiliki syarat sebagaimana ucapan *We Tënri Lallo* sewaktu dia ditawari jabatan untuk menjadi raja pada abad XV, sebagai berikut.

Adapun orang yang patut memimpin agar tanaman padi tak hampa, menyelimuti agar tak dingin (mengayomi) ialah orang yang mendapat pertolongan dari Dewata, yang memiliki empat macam kemampuan dalam kehidupannya. *Pertama*, kemampuan harta benda. *Kedua*, cakap dan terampil dan perkataannya pantas. *Ketiga*, kemampuan jasmani untuk memerintah. *Keempat*, hemat, cermat, bermurah hati pada rakyat dan suka menolong sesama manusia. (Abidin, 1983:164)

Lontara' di atas, terlihat bahwa tradisi *Lontara'* menyangkut masalah peran atau fungsi raja sebagai pemimpin puncak dalam negeri. menekankan masalah moral para pemimpin dan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang dipimpin dan bukanlah berdasar atas kekuasaan belaka. Nasib rakyat yang sewaktu-waktu terancam oleh perlakuan tidak adil dari pihak penguasa. Telah menjadi sasaran utama untuk diperhatikan. Rakyat mendapat perlindungan yang tegas untuk dilindungi haknya, diperbaiki kehidupannya dan diberi kebebasan untuk menikmati hidupnya dalam negeri. Kesetiaan atau dukungan rakyat kepada raja bukan berarti bahwa raja sebagai penguasa yang tertinggi dapat menjadikan rakyatnya sebagai objek semata, tanpa berusaha untuk memberi imbalan kebahagiaan hidup. Kesetiaan rakyat yang diberikan kepada raja dimaksudkan agar rakyat disayangi oleh raja dan memimpin menuju jalan kebahagiaan dan kedamaian hidup.

Falsafah *sulapa' ěppa*, dikemukakan oleh seorang raja yang bernama *Arung Matoa Matinrowa Rikannana* (memerintah pada akhir abad XVI atau permulaan abad XVII) bahwa individu yang cocok menjadi pemimpin haruslah memiliki empat sifat, karena hanya pemimpin yang memiliki sifat inilah yang akan memperbaiki negeri, yaitu sebagai berikut (1) jujur, yaitu jika bersalah atau dipersalahkan, dia meminta maaf, (2) berpengetahuan, yaitu mampu melihat kemungkinan akibat yang akan terjadi dari suatu kebijakan dan menjadikan kejadian yang telah lampau sebagai *soko guru* yang baik, (3) memiliki keberanian moral, yaitu tidak terkejut apabila mendengar berita buruk atau

baik, dan mampu menyatakan "ya" atau "tidak", (4) pemurah, yaitu memberikan minuman siang dan malam. Artinya, mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Pemimpin demikian disebut "*Mattuppu batu*" (pemimpin yang mampu memakmurkan rakyatnya). Hanya apabila tidak tertidur matanya, siang dan malam memikirkan rakyatnya, barulah ia disebut pemimpin (Abidin, 1969: 25). Hal ini juga dipertegas dalam rumusan kepemimpinan sosial Ki Hajar Dewantoro dengan 3 (tiga) ungkapan yang sangat dalam maknanya yakni, *ing ngarso sung tulodo, ing madyo magunkorso, tut wuri hadayani*. Kalimat ini bermakna dalam bahasa Bugis yang memberikan makna adalah "*Narekko riolo,i mabbere contoh bettuanna: narekko mancaji pemimpin mancaji suri tauladan ri tau-tau ripipinna, naniyya ritenggah weddiggi mabbere bimbingang lau ritau tau ri pinpinna, nanni narekko ri monri mancaji paberi semangat lao ritau ri pinpinna. (rebbasipatokkong, mali siparappe, malulu sipakaingge)*".

Nilai Lokal pada Kepemimpinan Kepala Sekolah

Moeng (1989:63) dalam Samad S (2000:30) menyebutkan, bahwa nilai lokal menempati posisi sentral dalam kerangka sistem nilai budaya Bugis-Makassar. Unsur-unsur nilai lokal meliputi (1) *pajjama* (usaha dan kerja keras) unsur-unsurnya meliputi percaya diri, rajin, tekun, ulet, pantang menyerah, kompetitif, optimis, dan (2) *lempu'* (jujur dan bertanggung jawab) unsur-unsurnya yaitu dapat dipercaya, siap menerima resiko, berdisiplin, dan setia terhadap teman atau kelompok, (3) *getteng* (tegas prinsip) unsur-unsurnya yaitu teguh pendirian, berani, dan konsisten, dan (4)

sipakatau (peduli dan menghargai orang lain) unsur-unsurnya yaitu tahu diri, menahan diri (kontrol diri), menghormati sesama, solidaritas atau kebersamaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewajaran dan kepatutan (etika hidup bersama).

Sumber lain menyebutkan bahwa, unsur-unsur nilai meliputi cendekia (*acca*), patut (*sitinaja*), teguh (*getteng*), serta usaha atau kerja keras (*reso*). Rahim (1985) dalam Marzuki (1995: 57). Namun nilai-nilai lokal yang selama ini di terapkan di SMA Negeri 1 Pammana yaitu nilai-nilai *siri*, *reso*, *lempu* dan *getteng*. Nilai lokal tidak saja menekankan unsur kewajiban manusia untuk mengontrol tingkah lakunya dengan orang lain. Tetapi juga memberi panduan bagi manusia untuk mengabdikan pada kebajikan. Di sini mengandung makna, bahwa "nilai adalah kualitas bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak". Sebagaimana dijelaskan oleh Budiyo (2007:75).

SIMPULAN

Sistem nilai dapat dianggap sebagai suatu kerangka dasar perseptual yang relatif menetap. Membentuk dan memengaruhi sifat umum perilaku individu tertentu. Moral, motif kejujuran, ataupun sistem nilai merupakan suatu hal yang harus ada pada setiap orang terlebih oleh seorang pemimpin seperti kepala sekolah.

Nilai lokal masyarakat Bugis yang tercermin dalam kepemimpinan Kepala sekolah se-Kabupaten Wadjo yaitu nilai *lempu'* (kejujuran), *acca* (kecendikiaan), *sitinaja* (kepatutan), *getteng* (ketegasan), dan *reso* (ketekunan atau usaha) harus jelas peranannya pada kegiatan-kegiatan, baik di kalangan

individu maupun institusi kemasyarakatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bennis, Warren. 1989. *On Becoming A Leader: The Leadership Clasic*. London: Zugo Press.
- Hughes, RB. 2006. *Achieving Effective Health Promotion for Women With Disabilities*. New York: Booklet Publisher.
- Fiedler. 1967. *Fiedler Contingency Model of Leadership Effectiveness: Background and Recent Developments*. Departement of Philosophy and Social Sciences: Eindhoven University of Technology.
- Meliala, Sudrajat. 1998. *Pendidikan Moral dan Penerapannya dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Bandung: Kembang Aksara.
- Merton, Robert C. 1969. *The Problem Was Formulated and Solved: Transaction Costs and Bankruptcy*. Zoul: Pape Black
- Munson. 1921. *Leadership As The Art of Inducing Compliance*. Murgon City: Sycaruse Book
- Rauch & Behling. 1984. *Essences of Leadership*. Philadelfia: Philadelfia University Press.
- Samad, S. 2000. *Nilai-nilai Moral dalam Pendidikan*. Jakarta: Cipta Karya